

Dinamika Penguasaan Lahan pada Usahatani Palawija di Lahan Kering Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

Dynamics Land Tenure in Dry Land Farming Crops Garut District West Java

Adang Agustian

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), Kementerian Pertanian
Jl. Tentara Pelajar No. 2A Cimanggu-Bogor.
e-mail : aagustian08@gmail.com

ABSTRACT

Land is one of the important factors of production in the agricultural production process. Productive land use is crucial to the productivity of agricultural commodities, especially food crops as a source of carbohydrates to ensure food security. This study aims to analyze changes in land tenure on farm crops dry dilahan Garut regency, West Java province. This study uses data PATANAS (National Farmers Panel Data) in 2008 and 2011, as well as use the data results of Census of Agriculture, West Java (ST 2003 and 2013). PATANAS Data collected included primary and secondary data. Agriculture Census data obtained from the Central Statistics Agency (CBS). The results were obtained several conclusions as follows: (1) Based on data from the Census of Agriculture known that the total tenure in 2013 both agricultural and non-agricultural land by farm household land users quite high at an average of 0.44 hectares. The average tenure of agricultural land, especially in non-paddy fields has increased compared to 2003 which is an area of 0.15 ha, (2) Size mastery and arable land per household for dry land, the average are 0.19 ha/HH (2008) and 0.39 ha/HH (2011). Most of the dry land is the property itself and cultivated its own with an average area of mastery is relatively narrow; (3) From the institutional side of the land, both involving land ownership belonging or not belonging to (renting, pawned or otherwise) was only slightly changed. Dynamics of changes in land ownership or status of arable land is not too volatile; and (4) Increased productivity of commodity plays an important role for the achievement of the level of production and the development of farming. Improved agricultural farming is a very dynamic and very flexible, as well as increased productivity. The application of agricultural technology as recommended, is a way to increase production and productivity achieved in the farming farmer-managed. In the farming activities, farmers are required to take a decision in terms of determining and selecting alternatives.

Keywords: Land tenure, dry land, crops, West Java.

Diterima : 14 Agustus 2016, disetujui : 29 Agustus 2016

PENDAHULUAN

Lahan merupakan salah satu factor produksi penting dalam proses produksi pertanian. Pemanfaatan lahan secara produktif sangat menentukan terhadap produktivitas komoditas pertanian, khususnya tanaman pangan sebagai sumber karbohidrat untuk menjamin ketahanan pangan Jawa Barat. Berdasarkan data BPS (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, 2014) bahwa luas baku lahan kering di Jawa Barat mencapai

1,80 juta ha yang diantaranya terdiri dari lahan tegal/kebun seluas 0,56 juta ha dan lahan ladang/huma seluas 0,22 juta ha.

Aspek penguasaan lahan tidak hanya penting untuk pertanian, tetapi juga bagi penentuan berbagai kebutuhan lain dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga lahan tidak hanya berfungsi sebagai asset produktif, akan tetapi dapat juga berfungsi sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Menurut Sumaryanto *et al.* (1994) bahwa lahan merupakan aset yang sangat penting bagi masyarakat perdesaan, khususnya bagi desa-desa yang kegiatan produksinya bersifat "landbase". Dengan demikian tingkat dan distribusi pemilikan lahan seringkali dapat dijadikan gambaran pemerataan faktor produksi sebagai sumber pendapatan dan sering pula sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sebenarnya. Penguasaan lahan tersebut dapat berubah baik perubahan karena hilangnya atau munculnya hak penguasaan maupun hak kepemilikan atas sebidang lahan. Hilang dan munculnya hak atas lahan dapat saja melalui berbagai proses sehingga seseorang berhak atau tidak berhak atas lahan yang bersangkutan. Proses tersebut dapat saja terjadi karena adanya transaksi jual beli, transaksi pembagian waris, hibah atau transaksi lainnya seperti bagi hasil, sewa, gadai atau numpang.

Pengelolaan lahan yang baik akan menjadi bagian penting kontribusinya terhadap pendapatan masyarakat. Upaya pemanfaatan lahan pertanian termasuk lahan kering dengan alokasi input dan penerapan teknologi tertentu akan memberikan hasil bagi pengelolanya. Disisi lain bahwa seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, dimana kebutuhan pangan yang juga semakin meningkat maka diperlukan terobosan dalam peningkatan produksi pangan. Upaya peningkatan produksi tersebut dapat dilakukan melalui intensifikasi (inovasi teknologi) dan ekstensifikasi (perluasan areal tanam).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan penguasaan lahan pada usahatani berbasis palawija dilahan kering di lokasi penelitian Kabupaten Garut, Jawa Barat.

METODE

Lahan merupakan salah satu faktor produksi penting dalam proses produksi pertanian, daya alam yang tidak terbaharui (*unrenewable*). Hampir semua sektor pembangunan fisik membutuhkan lahan (Sitorus, 1998). Lahan pertanian merupakan faktor utama bagi berjalannya usaha pertanian. Penggunaan lahan pertanian terbagi atas dua kategori yaitu: (1) lahan sawah dan (2) lahan kering (lahan bukan sawah). Lahan sawah terbagi atas 2 kategori, yaitu: (a) lahan sawah beririgasi adalah lahan sawah yang pasokan airnya dapat bersumber dari jaringan irigasi teknis, semi teknis atau irigasi sederhana/irigasi desa, dan (b) lahan sawah non irigasi adalah lahan sawah yang pasokan airnya tidak berasal dari jaringan irigasi melainkan bersumber dari air hujan atau sumber air lainnya.

Menurut Winarso (2012) bahwa dinamika pemilikan maupun penguasaan lahan bagi seorang petani sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan karena akan menentukan besarnya pendapatan rumahtangga. Pemilikan maupun penguasaan lahan merupakan faktor penting bagi penduduk di pedesaan yang kehidupannya masih tergantung pada sektor pertanian. Pemilikan lahan tidak hanya penting untuk pertanian, tetapi juga bagi penentuan berbagai kebutuhan lain dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga lahan tidak hanya berfungsi sebagai asset produktif, akan tetapi dapat juga berfungsi sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Hal yang demikian menjadikan lahan sebagai asset sekaligus komoditas yang setiap saat dapat berpindah tangan maupun berpindah status penguasanya.

Menurut Mudakir (2011) bahwa salah satu masalah yang paling berat dan kompleks yang dihadapi Indonesia adalah masalah lahan. Salah satunya dari masalah peralihan adalah menyangkut status penguasaan lahan yang mengkaitkan banyak petani. Status penguasaan lahan yang berbeda akan menentukan tingkat keragaman usaha tani, yang dalam hal ini meliputi tingkat produktivitas lahan dan distribusi pendapatan yang berlainan pula. Teori dasar yang dapat dipakai untuk menerangkan tingkah laku ekonomi

dari petani pemilik-penggarap, petani-penyewa dan petani-penggarap, adalah teorinya Marshall (1959), yang dikenal juga dengan “*The Tax equivalent Approach*”. Marshall dengan menggunakan analisis marjinal pada bagi hasil tanaman (*share cropping*), menyatakan karena petani bagi hasil hanya menerima sebagian produk marjinal dari masukan yang dikeluarkan (dalam hal ini tenaga kerja), maka petani dengan status penguasaan lahan ini tidak punya rangsangan yang cukup untuk menggunakan masukan yang dimilikinya sampai pada tingkat efisiensi Peretonya.

Upaya pemanfaatan lahan pertanian termasuk lahan kering dengan alokasi input dan penerapan teknologi tertentu akan memberikan hasil bagi pengelolanya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Irawan *et al.* (2004) bahwa lahan kering akan memberi kontribusi nyata dalam menghasilkan produk pertanian untuk mendukung ketahanan pangan, penyangga ekonomi, serta nilai sosial dan budaya dengan manajemen pengelolaan yang baik.

Penelitian ini menggunakan data PATANAS (Panel Petani Nasional) dan data Hasil Sensus Pertanian (ST) 2003 dan 2013. Data PATANAS yang dikumpulkan pada penelitian ini merupakan data hasil penelitian PATANAS tahun 2008 dan 2011. Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian dengan mewawancarai terhadap petani sampel dengan kuesioner terstruktur. Total petani sampel sebanyak 30 petani yang menanam palawija dilahan kering Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sementara data Sensus Pertanian (ST) 2003 dan 2013 diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta.

Sementara itu, untuk data sekunder sebagai data pendukung analisis diperoleh dari berbagai instansi atau dinas terkait penelitian ini dan juga lebih diperbaharui dengan data yang relative terbaru 5 tahun terakhir. Penentuan lokasi Kabupaten didasarkan atas total luasnya potensi lahan kering dan ditanami komoditas palawija di Provinsi Jawa Barat.

Untuk kebutuhan analisis digunakan perhitungan persentase respon petani dalam kegiatan usahatani di lokasi penelitian. Selain itu, juga dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dengan pendalaman analisis dari informasi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Lahan Kering dan Perkembangan Luas Panen, Produksi Palawija di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Potensi lahan Kering

Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak terbaharui (*unrenewable*). Hampir semua sektor pembangunan fisik membutuhkan lahan (Sitorus 1998). Notohadinegoro (2000) menjelaskan, lahan kering adalah lahan yang berada di suatu wilayah yang berkedudukan lebih tinggi yang diusahakan tanpa penggenangan air. Selanjutnya, Rukmana (2001) menegaskan, lahan kering merupakan sebidang lahan yang dapat digunakan untuk usaha pertanian dengan menggunakan air secara terbatas dan biasanya bergantung pada air hujan.

Menurut Abdurachman *et al.* (2008) mendefinisikan lahan kering sebagai salah satu agroekosistem yang mempunyai potensi besar untuk usaha pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura (sayuran dan buah-buahan), palawija maupun tanaman tahunan dan peternakan. Minardi (2009) menyatakan, lahan kering umumnya selalu dikaitkan dengan pengertian usaha tani bukan sawah yang dilakukan oleh masyarakat. Lahan merupakan salah satu faktor produksi yang ketersediaannya menjadi salah satu syarat untuk dapat berlangsungnya proses produksi pertanian.

Sementara itu, bila dipandang dari segi potensi luas wilayah Provinsi Jawa Barat meliputi wilayah daratan seluas 3.710.061, 32 ha dan garis pantai sepanjang 755,829 km. Tutupan lahan terluas di Jawa Barat berupa kebun campuran (22,89% dari luas wilayah Jawa Barat), sawah (20,27%) dan perkebunan (17,41%), sementara hutan primer dan sekunder di Jawa Barat hanya 15,93 % dari seluruh wilayah Jawa Barat.

Masing-masing wilayah memiliki ciri-ciri khusus baik dari aspek sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya. Sumberdaya alam dapat dibedakan berdasarkan topografi, jenis tanah, iklim, jenis penggunaan tanah dan lain-lain. Menurut fisiografinya, Jawa Barat dapat distratifikasi kedalam tiga strata wilayah yaitu (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, 2011): (1) Strata wilayah dataran rendah pantai utara, yaitu wilayah dengan topografi datar, dengan dominasi lahan sawah dan lahan keringnya sangat terbatas. Wilayah ini meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu dan Cirebon. Adapun dominasi lahan pada wilayah tersebut adalah yaitu dominan usahatani padi; (2) Strata wilayah dataran tinggi bagian tengah, dimana antara lahan sawah dan lahan keringnya hampir berimbang. Adapun topografi wilayah ini umumnya berbukit sehingga berbagai komoditi dapat dikembangkan seperti padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan aneka tanaman lainnya. Strata wilayah ini meliputi Kabupaten Bogor, Purwakarta, Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, serta bagian utara dari kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya dan Ciamis; dan (3) Strata wilayah Jawa Barat Selatan, dengan topografi didominasi oleh perbukitan dan pegunungan, dengan sedikit lahan datar, sehingga luas lahan sawah terbatas yang umumnya disekitar sungai dan pantai. Pengembangan usahatani tanaman pangan harus hati-hati dengan memperhatikan kemiringan lahan dan dengan usahatani konservasi. Wilayah ini meliputi Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya dan Ciamis.

Menurut data BPS 2014 (BPS Jawa Barat, 2014) bahwa luas lahan pertanian di Jawa Barat mencapai 2.735.753 ha, yang terdiri dari lahan sawah sebesar 34,34% (939.353 ha) dan lahan kering 65,66% (1.796.400 ha). Adapun di Kabupaten Garut, total luas lahan pertanian mencapai 248.548 ha, yang terdiri dari lahan sawah seluas 48.541 ha (19,53%) dan lahan kering 200.007 ha (80,47%). Dengan demikian lahan kering merupakan lahan dominan untuk pertanaman terutama di lokasi penelitian Kabupaten Garut.

Apabila dipilah jenis lahan kering yang ada untuk pertanaman palawija seperti kacang tanah, pada Tabel 2 disajikan luasan di Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat. Secara umum kacang tanah di Jawa Barat di tanam di lahan tegalan dan ladang/huma. Adapun luas lahan tegal dan ladang di Kabupaten Garut mencapai 101.331 ha, dan di Jawa Barat mencapai 774.313 ha. Menurut Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat (2014) bahwa saat ini lahan yang potensial untuk menanam kacang tanah mencapai 700.000 ha. Adapun budidaya kacang tanah dengan palawija lainnya seperti jagung di Jawa Barat baru digarap pada lahan seluas 186.267 ha.

Tabel 2. Luas lahan kering per jenis penggunaannya di Kabupaten Garut Jawa Barat, 2014

Jenis Lahan Kering	Kab. Garut	Provinsi Jawa Barat
1. Tegak/Kebun	63.774	556.658
2. Ladang/Huma	37.554	217.655
3. Perkebunan	26.523	282.620
4. Hutan Rakyat	11.946	239.384
5. Tambak	0	0
6. Kolam/Tebat/Empang	0	0
7. Padang Rumput	4.642	24.891
8. Sementara tidak diusahakan	407	9.024
9. Lainnya	55.161	466.168
Total Lahan Kering	200.007	1.796.400

Sumber: BPS Jawa Barat (2014).

Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Palawija

Kinerja luas panen, produksi dan produktivitas palawija disajikan pada Tabel 3. Pada tahun 2014, luas panen palawija terbesar baik di Jawa Barat maupun di Kabupaten Garut adalah jagung, kemudian diikuti kacang tanah, dan kemudian kedelai. Di Jawa Barat luas panen jagung mencapai 142,96 ribu ha dan di Garut mencapai 78,62 ribu ha. Untuk kacang tanah luasnya sebesar 50,01 ribu ha di Jawa Barat dan 19,22 ribu ha di Garut. Seiring dengan dominannya luas panen, maka produksinya pun juga bahwa jagung tertinggi

kemudian diikuti kacang tanah dan kemudian kedelai. Di Jawa Barat produksi jagung mencapai 1,05 juta ton dan di Garut mencapai 0,63 juta ton. Untuk kacang tanah produksinya sebesar 73,81 ribu ton di Jawa Barat dan 30,14 ribu ton di Garut.

Tabel 3. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kacang Tanah di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut, 2014.

Tahun	Provinsi Jawa Barat			Kabupaten Garut		
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivi-tas (ton/ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivi-tas (ton/ha)
Jagung	142.964	1.047.077	7,32	78.624	626.876	7,97
Kedelai	70.719	115.261	1,63	15.231	22.640	1,49
Kc. Tanah	50.007	73.808	1,48	19.218	30.841	1,60

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka, BPS Jabar (2015).

Pemanfaatan lahan secara produktif sangat menentukan terhadap produktivitas komoditas pertanian, khususnya tanaman pangan sebagai sumber karbohidrat untuk menjamin ketahanan pangan Jawa Barat. Berdasarkan data BPS (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, 2011) bahwa tantangan dalam penggunaan lahan pertanian di Jawa Barat secara umum dan Kabupaten Garut adalah terkait adanya konversi lahan. Penurunan lahan pertanian salah satunya disebabkan dengan banyaknya lahan pertanian yang mengalami alih fungsi menjadi non pertanian, seperti untuk perumahan, industri/pabrik, pembangunan infrastruktur jalan dan lainnya. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, dimana kebutuhan pangan yang juga semakin meningkat maka diperlukan terobosan dalam peningkatan produksi pangan. Upaya peningkatan produksi tersebut dapat dilakukan melalui intensifikasi (inovasi teknologi) dan ekstensifikasi (perluasan areal tanam). Selain itu, faktor iklim, curah hujan dan kesuburan tanah juga berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas palawija. Oleh karena itu, diperlukan inovasi teknologi baru yang menyesuaikan dengan kondisi alam.

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, akan meningkatkan permintaan dan intensitas penggunaan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan (Abdurachman et al. 2008). Kondisi ini akan menciptakan pola penggunaan lahan yang cenderung berorientasi produksi tanpa memerhatikan konservasi lahan. Apabila hal ini dibiarkan, kerusakan lahan yang telah terjadi akan semakin parah sehingga produktivitas lahan terus merosot, yang pada akhirnya akan menurunkan kesejahteraan petani (Idjudin dan Marwanto, 2008).

Apabila dilihat lebih jauh, ternyata masih dijumpai kendala antar sektoral yang dihadapi dalam peningkatan produksi tanaman pangan. Hal ini disebabkan oleh berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan strategis di luar sektor pertanian yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan produksi tanaman pangan. Tantangan utama yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan adalah: (1) Meningkatnya permintaan pangan sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk, (2) Terbatasnya ketersediaan pangan nasional maupun dunia, dan (3) Kecenderungan meningkatnya harga pangan (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, 2013). Di samping tantangan, upaya peningkatan produksi tanaman pangan juga dihadapkan pada sejumlah permasalahan, yaitu antara lain: (1) Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), (2) Rusaknya infrastruktur irigasi, lingkungan dan semakin terbatasnya sumber air, (3) Konversi lahan sawah, (4) Keterbatasan akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan, (5) Kompetisi antar komoditas, dan (6) Belum sinerginya antar sektor dan pusat-daerah dalam menunjang pembangunan pertanian khususnya produksi padi dan palawija lain.

Hal diatas sejalan dengan hasil penelitian Nurdin (2011) yang menyatakan bahwa dalam pemanfaatan lahan kering seperti halnya pada kasus di Limboto Gorontalo menghadapi kendala dan permasalahan seperti biofisik lahan (kesuburan tanah rendah, rentan erosi dan sedimentasi, pendangkalan Danau Limboto, dan

iklim), serta permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya. Berbagai masalah tersebut perlu diatasi dengan teknologi pengelolaan lahan yang tepat. Untuk itu, dalam pengelolaannya Dalam penggunaan lahan kering perlu sinkronisasi dan koordinasi di antara institusi pemerintah dan melibatkan petani agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan.

Dinamika Penguasaan Lahan Kering

Kabupaten Garut merupakan lokasi penelitian dengan desa yang berbasis palawija. Hasil penelitian PATANAS Tahun 2008 dan 2011 menunjukkan bahwa luas penguasaan dan garapan lahan per KK untuk lahan tegalan, rata-rata adalah 0,19 ha/KK (2008) dan 0,39 ha/KK (2011). Dari luasan tersebut sekitar 0,11 ha/KK (54,23%) tahun 2008 dan 0,14 ha/KK (35,90%) di antaranya adalah milik sendiri, sementara sisanya masing-masing seluas 0,08 ha/KK (45,77%) dan 0,25 ha/KK 64,10 adalah lahan yang disewa, disakap, digadai dan lahan dengan status lainnya seperti milik keluarga besar, lahan kas desa dan titip kelola. Berdasarkan luas lahan yang dikuasai tersebut, seluas 0,15 ha/KK tahun 2008 dan seluas 0,14 ha/KK tahun 2011 digarap sendiri, dan sisanyamerupakan lahan milik yang digarap oleh orang lain baik dengan cara disakapkan, digadaikan, digarap keluarga lain atau dipinjamkan. Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar lahan tegalan adalah milik sendiri dan digarap sendiri walau dilihat rata-rata luas penguasaan dan garapan sangat sempit.

Sementara untuk lahan sawah, rata-rata luas lahan yang dikuasai tahun 2008 dan 2011 masing-masing seluas 0,20 ha/KK dan 0,57 ha/KK, dimana dari luasan tersebut masing-masing seluas 0,15 ha/KK dan 0,22 ha/KK adalah milik sendiri. Selebihnya dari luasan tersebut, yaitu seluas 0,01 ha/KK tahun 2008 dan 0,35 ha/KK tahun 2011 merupakan penguasaan lahan bukan milik baik berupa lahan yang dikuasai dari menyewa, menyakap atau menggadai. Berdasarkan luas lahan sawah yang dikuasai tersebut, pada tahun 2008 dan 2011 masing-masing seluas 0,19 ha/KK dan 0,29 ha/KK digarap sendiri, sedangkan sisanya tahun 2008 seluas 0,02 ha/KK tidak digarap sendiri, melainkan disewakan, disakapkan, digadaikan atau digarap keluarga lain. Untuk lahan perkebunan, menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan yang dikuasai pada tahun 2008 dan 2011 masing-masing seluas 0,20 ha/KK dan 0,27 ha/KK, dimana lahan perkebunan seluas 0,19 ha/KK dan 0,27 ha/KK di antaranya merupakan lahan milik sendiri, sementara sisanya merupakan lahan bukan miliknya yaitu berasal dari sewa, disakap atau lainnya. Dari luas lahan perkebunan yang dikuasai tersebut, tahun 2008 dan 2011 masing-masing seluas 0,18 ha/KK dan 0,29 ha/KK digarap sendiri, dan sisanya digarap keluarga lain, titip kelola dan lainnya. Untuk lahan pekarangan, rata-rata luas lahan yang dikuasai pada tahun 2008 dan 2011 masing-masing seluas 0,02 ha/KK dan 0,01 ha/KK, dimana keseluruhannya adalah milik sendiri. Terlihat bahwa sebagian besar lahan pekarangan adalah milik sendiri dan digarap sendiri.

Bila dilihat atas rata-rata total luas lahan kering yang dikuasai petani responden untuk tahun 2008 dan 2011 masing-masing adalah seluas 0,61 ha/KK dan 1,24 ha/KK, dimana masing-masing seluas 0,46 ha/KK dan 0,64 ha/KK di antaranya merupakan lahan milik sendiri, sementara sisanyamerupakan lahan yang disewa, disakap, digadai, milik keluarga besar, lahan kas desa, dan titip kelola. Dari total luas lahan yang dikuasai tersebut, sebanyak 0,53 ha/KK tahun 2008 dan 0,66 ha/KK digarap sendiri, khusus pada tahun 2008 seluas 0,09 ha/KK disewakan, disakapkan, digadaikan, digarap keluarga lain, dipinjamkan dan lainnya. Menurut Rasmikayati (2015) bahwa jika terdapat penurunan luas lahan untuk pertanian akan berakibat pada meningkatnya jumlah petani yang luas penguasaan lahannya kurang dari 0,5 hektar (gurem) dan mereka semakin sulit untuk memperluas lahannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi kelembagaan lahan, baik yang menyangkut status penguasaan lahan milik maupun, bukan milik (nyewa, nyakap, menggadai maupun lainnya) ternyata hanya sedikit mengalami perubahan. Demikian juga lahan milik baik yang digarap sendiri maupun digarap orang lain baik dengan cara disewakan, disakapkan, digadaikan maupun lainnya juga tidak banyak berubah. Dinamika perubahan status penguasaan lahan maupun status garapan lahan tidak terlalu berfluktuatif, karena

lahan di wilayah desa penelitian Kabupaten Garut merupakan lahan yang didominasi oleh lahan guntai atau lahan yang dimiliki oleh orang luar daerah. Sehingga proses transaksi lahan baik sewa, sakap, gadai maupun proses lainnya menjadi lamban.

Tabel 4. Rata-rata Penguasaan Lahan dan Garapan Lahan di Kab. Garut Jawa Barat Berdasarkan data PATANAS 2008 dan 2011.

Uraian	2008					2011				
	Tegal-an	Sawah	Kebun	Pekara-ngan	Total	Tegal-an	Sawah	Kebun	Pekara-ngan	Total
Status Penguasaan:										
1. Milik sendiri	0.11	0.15	0.19	0.02	0.46	0.14	0.22	0.27	0.01	0.64
2. Bukan milik sendiri:										
Disewa	0.02	0.02	0.00	0.00	0.04	0.15	0.24	0.00	0.00	0.39
Disakap	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Digadai	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.11	0.00	0.00	0.11
Lainnya	0.06	0.02	0.01	0.00	0.09	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
Total (2)	0.09	0.05	0.02	0.00	0.16	0.25	0.35	0.00	0.00	0.60
3. Total 1+2	0.19	0.20	0.20	0.02	0.61	0.39	0.57	0.27	0.01	1.24
Status Garapan:										
1. Digarap sendiri	0.15	0.19	0.18	0.01	0.53	0.14	0.22	0.29	0.01	0.66
2. Tidak digarap sendiri:										
Disewakan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disakapkan	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Digadaikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lainnya	0.03	0.01	0.02	0.01	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (2)	0.04	0.02	0.02	0.01	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total 1+2	0.20	0.20	0.20	0.02	0.61	0.14	0.22	0.29	0.01	0.66

Sumber : Data primer Patanas 2011 (diolah)

Peningkatan produktivitas komoditas memegang peranan penting untuk tercapainya tingkat produksi dan berkembangnya usahatani. Pertanian yang maju adalah pertanian yang sangat dinamis dan sangat fleksibel, serta meningkat terus produktivitasnya, oleh karena itu hasil pembangunan pertanian perlu adanya kemajuan dalam bidang teknologi pertanian. Penerapan teknologi pertanian sesuai anjuran, merupakan jalan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas yang dicapai petani dalam usahatani yang dikelola. Di dalam melakukan usahatannya, petani dituntut mengambil keputusan dalam hal menentukan dan memilih alternatif yang ada.

Analisis Data Hasil Sensus Pertanian

Berdasarkan data Sensus Pertanian bahwa pada lahan pertanian dibagi menjadi dua jenis yaitu lahan sawah dan lahan bukan sawah. Pada Provinsi Jawa Barat, total penguasaan lahan pada tahun 2013 baik lahan pertanian maupun bukan pertanian oleh rumah tangga pertanian pengguna lahan cukup tinggi yaitu rata-rata sebesar 0,44 hektar. Dibandingkan dengan tahun 2003, rata-rata penguasaan lahan tersebut meningkat sebesar 0,29 hektar, dimana pada tahun 2003 rata-rata luas lahan yang dikuasai sebesar 0,15 hektar. Selanjutnya pada lahan pertanian, tahun 2013 tingkat penguasaannya oleh rumah tangga pertanian rata-rata sebesar 0,42 hektar atau meningkat sekitar 0,29 ha dibandingkan tahun 2003 yaitu sebesar 0,13 hektar. Bila diuraikan lebih lanjut atas lahan pertanian, maka untuk lahan sawah rata rata penguasaannya oleh rumah tangga pertanian pengguna lahan sebesar 0,24 hektar atau meningkat sekitar 0,17 hektar dibandingkan tahun

2003 yaitu sebesar 0,07 hektar. Sementara pada lahan bukan sawah rata rata penguasaan oleh rumah tangga pertanian pengguna lahan sebesar 0,18 hektar atau meningkat sebesar 0,12 hektar dibandingkan tahun 2003 yaitu sebesar 0,06 hektar. Sementara pada lahan bukan pertanian, penguasaannya relatif stagnan yaitu pada tahun 2003 dan 2013 sebesar 0,02 hektar (Tabel 5).

Tabel 5. Rata-rata Luas Lahan yang Dikuasai per Rumah Tangga Usaha Pertanian di Indonesia dan di Provinsi Jawa Barat, 2003 dan 2013 (Ha).

Provinsi	Lahan Bukan Pertanian		Lahan Pertanian				Lahan yang Dikuasai			
			Lahan Sawah		Lahan Bukan Sawah		Jumlah			
	2003	2013	2003	2013	2003	2013	2003	2013		
Jawa Barat	0,02	0,02	0,07	0,24	0,06	0,18	0,13	0,42	0,15	0,44
Indonesia	0,06	0,03	0,10	0,20	0,25	0,66	0,35	0,86	0,41	0,89

Sumber: BPS (Sensus Pertanian 2003 dan 2013).

Pada lokasi penelitian lainnya seperti di Provinsi Jawa Barat, tahun 2013 terdapat sekitar 3,04 juta rumah tangga petani pengguna lahan. Dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya yakni pada tahun 2003, jumlah rumah tangga pertanian pengguna lahan tahun 2013 di Jawa Barat justru lebih tinggi penurunannya dibandingkan dengan di Provinsi Lampung yaitu sebanyak 1,20 juta rumah tangga atau sebesar 28,34 persen terhadap 2003. Berdasarkan jumlah rumah tangga petani pengguna lahan tersebut, pada tahun 2013 sebanyak 2,30 juta rumah tangga merupakan rumah tangga usaha pertanian gurem, dan jumlahnya juga mengalami penurunan signifikan dibanding tahun 2003 yaitu sebanyak 1,20 juta rumah tangga atau sekitar 34,37 persen (Tabel 6).

Tabel 6. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan dan Rumah Tangga Petani Gurem di Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, 2003 dan 2013 (RT).

Provinsi	Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan				Rumah Tangga Usaha Pertanian Gurem			
			Pertumbuhan				Pertumbuhan	
	2003	2013	Absolut	%	2003	2013	Absolut	%
Jawa Barat	4.242.003	3.039.716	-1.202.287	-28,34	3.501.867	2.298.193	-1.203.674	-34,37
Indonesia	30.419.582	25.751.267	-4.668.315	-15,35	19.015.051	14.248.864	-4.766.187	-25,07

Sumber: BPS (Sensus Pertanian 2003 dan 2013).

Menurut hasil kajian Lokollo *et al.* (2007) mengungkapkan bahwa permasalahan besar lainnya yang dihadapi pertanian Indonesia adalah semakin meningkatnya ketimpangan distribusi penguasaan lahan, semakin menurunnya luas penguasaan lahan per rumah tangga petani, dan eksistensi petani kecil sebagai sumber ketimpangan penguasaan lahan. Dalam konteks ini dibutuhkan komitmen dan kapasitas pemerintah untuk menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk memberikan fasilitasi kebijakan bagi pengembangan petani skala kecil. Kebijakan tersebut mencakup dukungan kebijakan publik (R&D, penyuluhan dan insentif usahatani), perbaikan efisiensi pemasaran, dan dukungan kelembagaan usahatani dan agribisnis. Kebijakan strategis lain yang perlu dipertimbangkan diantaranya adalah: (a) Peningkatan akses sumberdaya lahan bagi petani kecil melalui pengembangan kelembagaan dan pasar informal lahan khususnya di daerah dengan modal sosial tinggi; (b) Pengembangan kebijakan distribusi lahan pertanian (agricultural land allotment) yang dinilai lebih praktis bagi petani kecil dibandingkan dengan redistribusi penguasaan lahan; (c) kebijakan distribusi lahan ini (reformasi lahan) perlu didukung dengan kebijakan revitalisasi pertanian dan reformasi ekonomi perdesaan dengan keberpihakan pada petani kecil.

Pola tanam yang diterapkan oleh petani di suatu wilayah sangat tergantung pada agroekosistem dan tipe lahan tersedia bagi kegiatan usahatani yang dikelolanya. Dengan demikian, maka pola tanam berperan penting sebagai salah satu unsur teknologi dalam pengelolaan tanaman secara terpadu. Sejalan dengan itu, maka pola tanam tidak hanya mencakup pergiliran tanaman (monokultur dan polikultur) akan tetapi menyangkut sistem pertanaman (tumpang sari, tumpang gilir, *strip cropping* dan berurutan).

Hasil penelitian di wilayah agroekosistem berbasis lahan kering tegalan dengan komoditas palawija (jagung, kedelai, kacang tanah dan ubikayu), dilihat dari perkembangan penerapan pola tanam/dinamikanya dalam kurun waktu tiga tahun (2008-2011) untuk wilayah desa basis komoditas jagung dan kedelai, sebagian besar petani tetap menerapkan pola pertanaman “Palawija-Palawija-Bera”. Berdasarkan pola pergiliran pertanaman di wilayah desa penelitian Patanas untuk desa basis palawija jagung, kedelai dan terutama kacang tanah umumnya memiliki intensitas pertanaman (IP) sebesar 200 (Tabel 7).

Tabel 7. Dinamika Pola Pergiliran Pertanaman di lokasi Penelitian Kabupaten Garut Jawa Barat, 2008 dan 2011

Komoditas Basis	IP-300		IP-200		IP-100		Total	
	2008	2011	2008	2011	2008	2011	2008	2011
PALAWIJA								
1. Jagung	14,5	11,4	75,8	88,6	9,7	0	100	100
2. Kedelai	41,7	32,2	58,3	67,5	0	0	100	100
3. Kacang tanah	14,8	0	72,5	43,6	12,7	56,4	100	100
4. Ubikayu	0	0	30,0	25,0	70,0	75,0	100	100

Sumber : Data primer (diolah)

KESIMPULAN

Pada lokasi penelitian, rata-rata luas penguasaan dan garapan lahan per KK untuk lahan tegalan, rata-rata adalah 0,19 ha/KK (2008) dan 0,39 ha/KK (2011). Dari luasan tersebut sekitar 0,11 ha/KK (54,23%) tahun 2008 dan 0,14 ha/KK (35,90%) di antaranya adalah milik sendiri, sementara sisanya masing-masing seluas 0,08 ha/KK (45,77%) dan 0,25 ha/KK 64,10 adalah lahan yang disewa, disakap, digadai dan lahan dengan status lainnya. Berdasarkan luas lahan yang dikuasai tersebut, seluas 0,15 ha/KK tahun 2008 dan seluas 0,14 ha/KK tahun 2011 digarap sendiri, dan sisanya merupakan lahan milik yang digarap oleh orang lain baik dengan cara disakapkan, digadaikan, digarap keluarga lain atau dipinjamkan. ; Dari sisi kelembagaan lahan, baik yang menyangkut status penguasaan lahan milik maupun, bukan milik (nyewa, nyakap, menggadai maupun lainnya) ternyata hanya sedikit mengalami perubahan. Demikian juga lahan milik baik yang digarap sendiri maupun digarap orang lain baik dengan cara disewakan, disakapkan, digadaikan maupun lainnya juga tidak banyak berubah. Dinamika perubahan status penguasaan lahan maupun status garapan lahan tidak terlalu berfluktuatif, karena lahan di lokasi penelitian Kabupaten Garut didominasi oleh lahan yang pemiliknya dari luar daerah, sehingga proses transaksi lahan baik sewa, sakap, maupun gadai relatif lamban. ; Peningkatan produktivitas komoditas memegang peranan penting untuk tercapainya tingkat produksi dan berkembangnya usahatani. Pertanian yang maju adalah pertanian yang sangat dinamis dan sangat fleksibel, serta meningkat terus produktivitasnya, oleh karena itu hasil pembangunan pertanian perlu adanya kemajuan dalam bidang teknologi pertanian. Penerapan teknologi pertanian sesuai anjuran, merupakan jalan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas yang dicapai petani dalam usahatani yang dikelola.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurachman, A., A. Dariah, dan A. Mulyani. 2008. Strategi dan teknologi pengelolaan lahan kering mendukung pengadaan pangan nasional. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 27(2): 43–49.

Agustian, A : *Dinamika Penguasaan Lahan pada Usahatani Palawija di Lahan Kering Kabupaten Garut...*

BPS. 2015. Jawa Barat Dalam Angka 2014. BPS Provinsi Jawa Barat. Bandung (Indonesia).

Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. Data Sensus Pertanian 2013 (ST2013). BPS. Jakarta-Indonesia.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. 2013. Laporan Tahunan. Bandung (Indonesia).

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. 2014. Laporan Tahunan. Bandung (Indonesia).

Idjudin, A.A. dan S. Marwanto. 2008. Reformasi pengelolaan lahan kering untuk mendukung swasembada pangan. *Jurnal Sumberdaya Lahan* 2(2): 115–125.

Irawan, E. Husen, Maswar, R.L. Watung, dan F. Agus. 2004. Persepsi dan apresiasi masyarakat terhadap multifungsi pertanian: studi kasus di Jawa Barat dan Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Multifungsi Pertanian dan Konservasi Sumberdaya Lahan*, Bogor 18 Desember 2003 dan 7 Januari 2004. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Bogor.

Lokollo, E. M, I.W.Rusastra, H. P. Saliem, Supriyati, S. Friyatno dan G. S. Budhi. 2007. *Dinamika Sosial Ekonomi Perdesaan: Analisis Perbandingan Antar Sensus Pertanian*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.

Marshall, A. 1959. *Principles of Economics*. Macmillan & Co. Ltd, London.

Minardi, S. 2009. *Optimalisasi Pengelolaan Lahan Kering untuk Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan*. Orasi Pengukuhan Guru Besar Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Mudakir, B. 2011. Produktivitas Lahan dan Distribusi Pendapatan Berdasarkan Status Penguasaan Lahan Pada Usahatani Padi (Kasus di Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Juli 2011, Vol. 1(1): 74-82.

Notohadinegoro, T. 2000. Diagnostik fisik kimia dan hayati kerusakan lahan. hlm 54–61. *Prosiding Seminar Pengusutan Kriteria Kerusakan Tanah/Lahan*, Asmendap I LH/Bapedal, Yogyakarta, 1–3 Juli 2000.

Nurdin. 2011. Penggunaan Lahan Kering di Das Limboto Provinsi Gorontalo untuk Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Litbang Pertanian*, 30(3): 98-107.

Rasmikayati, E. 2015. Partisipasi Petani Pada Pasar Lahan (Studi Kasus Pada Petani Kentang Jawa Barat). *Agrisep Vol (16) No. 1:10-19*.

Rukmana, R. 2001. *Teknik Pengelolaan Lahan Kering Berbukit dan Kritis*. Kanisius, Yogyakarta.

Sitorus, R.P. 1998. *Evaluasi Sumber Daya Lahan*. Tarsito, Bandung.

Sudaryono. 2007. Inovasi Rekayasa Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu Kedelai. *Buletin Palawija* No.3: 7-14.

Sumaryanto, H.P. Saliem, N. Syafaat, M. Ariani, S. Friyatno, S.K. Dermorejo, S.H. Suhartini dan A. Pakpahan. 1994. *Analisis Kebijakan Konversi Lahan ke Penggunaan NonPertanian*. Laporan Hasil penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

Winarso, B. 2012. Dinamika Pola Penguasaan Lahan Sawah di Wilayah Pedesaan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan* Vol. 12 (3): 137-149.